



LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026.

Akhirnya kami sampaikan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Tg. Balai Karimun, 21 Februari 2025



**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196710031992031010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kabupaten Karimun selama tahun 2021-2026 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa"**, dengan **Misi Ketiga** : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)" dan **Misi Kelima** : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik) sementara Analisis akuntabilitas kinerja terhadap dua misi tersebut diatas dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis, di mana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan didukung 5 (Lima) program dan 15 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8,054,550,916,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 7,245,056,086,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,886,560,359,- atau 95,05 persen.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	I-3
I.3 Isu Strategis	I-5
I.4 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Tahun 2024	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-7
II.1 Visi	II-7
II.2 Misi	II-8
II.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD	II-8
II.4 Perjanjian Kinerja	II-9
II.5 Program dan Kegiatan	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-11
A Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	III-11
III.1 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun	III-17
III.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu	III-18
III.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan	III-20
III.4 Penjenjangan Perjanjian Kinerja / Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	III-23

III.5	Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Pejabat yang Dinilai	
	Eselon II	III-27
III.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-29
B	Realisasi Anggaran	III-33
BAB IV	PENUTUP	IV-36

Lampiran :

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Matriks Rencana Strategis
- 4) Pohon dan Cascading Misi 3
- 5) Pohon dan Cascading Misi 5

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2024	I-6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Tahun 2024	II-9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024	II-9
Tabel 2.3 Program dan Anggaran Tahun 2024	II-10
Tabel 3.1 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Disnakerind Tahun 2024	III-12
Tabel 3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024	III-13
Tabel 3.3 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Perusahaan Wajib Lapo Tahun 2024	III-14
Tabel 3.4 Pertumbuhan IKM Tahun 2024.....	III-16
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	III-16
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan Akhir Renstra Tahun 2026	III-17
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	III-18
Tabel 3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja	III-20
Tabel 3.9 Penjenjangan Perjanjian Kinerja	III-24
Tabel 3.10 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2024 dengan Pejabat yang Dinilai Eselon II	III-28
Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-29
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2024	III-33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5), membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menangani urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dengan urusan wajib non pelayanan dasar dan di bidang perindustrian dengan urusan pilihan.

Sebagai bentuk penjabaran dari asas akuntabilitas yang menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagai salah satu perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menggambarkan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah khususnya yang berkaitan pencapaian sasaran, tujuan, target dan indikator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selama kurun waktu tahun 2024, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada Bupati.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kabupaten Karimun ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2024 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5), yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan

Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), yakni :

A. Tugas

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

B. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

C. Uraian Tugas

Uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yakni :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh atasan.

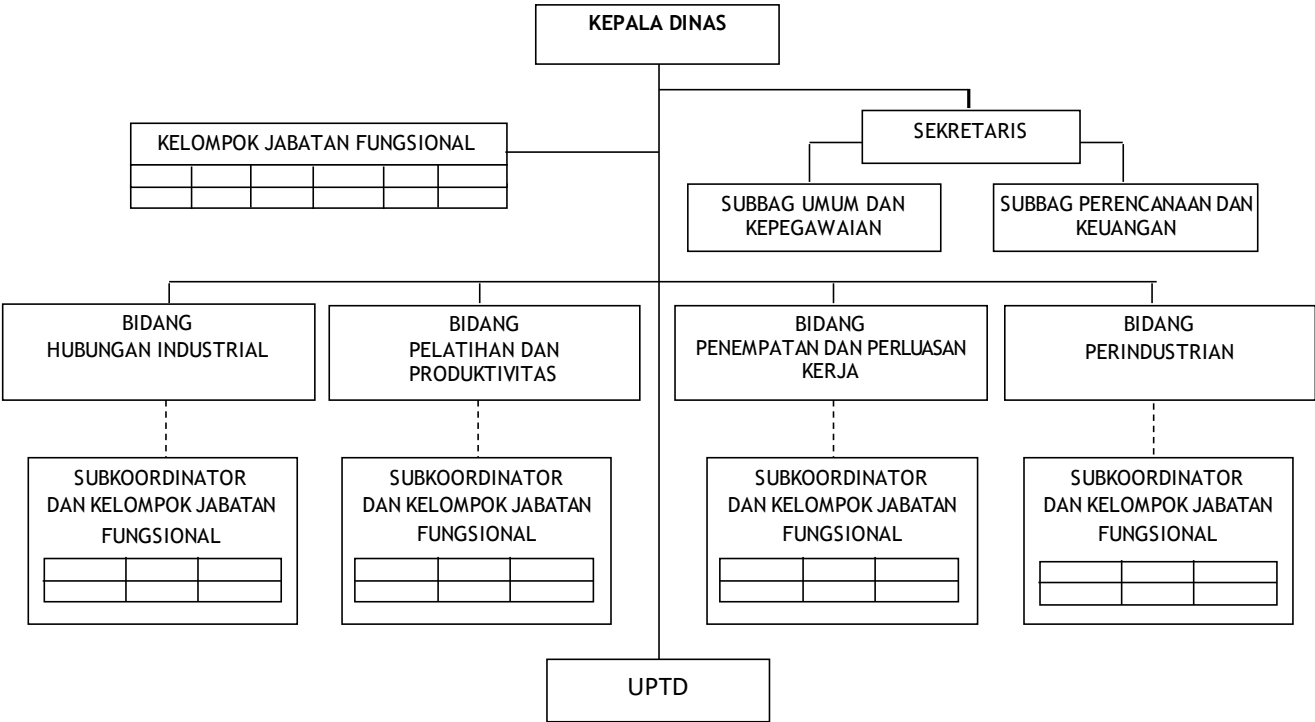
D. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

- 4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. UPTD; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana tabel di bawah ini:

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun



I.3 ISU STRATEGIS

Suatu kondisi menjadi isu strategis disebabkan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program kegiatan adalah upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi isu strategis, sehingga tujuan Dinas dapat tercapai dengan maksimal. Adapun isu strategis yang menjadi

penentu/berpengaruh dalam pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja;
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja;
4. Menciptakan Kesempatan kerja dengan menumbuhkan wirausahabaru seperti Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
5. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha;
6. Meningkatkan Pelaksanaan Pengelolaan untuk menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah

I.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah selama Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2024

PERMASALAHAN	
Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Perindustrian
1. Masih Relatif Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha. 2. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. 3. Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan norma ketenagakerjaan sesuai aturan. 4. Masih rendahnya komitmen perusahaan untuk merekrut dan melindungi para tenaga kerja wanita dan penyandang disabilitas. 5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menginformasikan lowongan pekerjaan. 6. Kurangnya pengetahuan pencaker dalam penggunaan teknologi.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal. 2. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi. 3. Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan- perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya. 4. Ketersediaan daya listrik untuk industri, Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (PT. SOMA) baru akan beroperasi pada tahun 2022 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

Sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun selaras dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan stakeholder yang berkaitan dengan urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

II.1 VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Karimun selama periode 2021-2026 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.**

II.2 MISI

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Karimun selama periode 2021-2026, maka Misi pembangunan Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)
- 2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)
- 4) Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam melestarikan lingkungan hidup)
- 5) Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)

Sebagaimana dengan misi tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mendapatkan amanah untuk menjalankan misi sebagai berikut :

Misi ketiga : “Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)”

Misi kelima : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)

Dari misi ketiga dan kelima inilah yang kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran dari proses pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kabupaten Karimun.

II.3 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun di RPJMD Periode Tahun 2024, serta pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Periode 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Tahun 2024

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)					
No	Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berikaitan Dengan Pelayanan Dasar				
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62 %
				2. Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	97,75 %
2	Urusan Pemerintahan Pilihan				
B	Urusan Pemerintahan Pilihan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	1. Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	0,55 %

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	Nilai Akip	73
		Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level	3

II.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62 %
		2. Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	97,75 %

2	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	3. Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	0,55 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	4. Nilai Akip	73 Nilai
		5. Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level 3

II.5 PROGRAM

Program dan Anggaran untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 serta Program Penunjang sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.3 Program dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.889.053.540,-
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.865.842.000,-
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 298.639.656,-
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 607.410.520,-
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 393.605.200,-
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 49,999,228,-
	TOTAL	Rp. 8.054.550.916,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur pedoman Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) bagi instansi pemerintah untuk menilai tingkat kinerja dalam mewujudkan sasaran dan kinerja organisasi.

Format Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Penghitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, penilaian kinerja organisasi sejalan dengan mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah.

A Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang digunakan untuk Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada masing-masing indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai akhir Capaian PK	Bukti Dukung	Catatan Tim Penilai
1	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62%	68.25%	110.08%	110%	15%	94%	https://drive.google.com/drive/folders/19ToMNH0D9Kw2kM3HuaAWD_z5un9KL4m	Bukti dukung relevan
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	97.75%	97.13%	99.37%	99.37%	15%	84%	https://drive.google.com/drive/folders/1QTzPZkaqTD_fiBm01dXLWKz-CgicRfq	Bukti dukung relevan
2	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	0.55%	0.67%	121.82%	110%	15%	94%	https://drive.google.com/drive/folders/1sa1R9yR6HNscU7ZcIb4B-kDrtruUhWBT	Bukti dukung relevan
3	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	73	60.98	83.53%	83.53%	15%	71%		Bukti dukung relevan
		Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	3	3.142	104.73%	104.73%	15%	89%		Bukti dukung relevan
Total Capaian PK								431.49%	Tingkat Implementasi Manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi	
Rata-rata Capaian PK								86.30%		
Predikat PK								BAIK		

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024 diatas sebanyak 5 (lima) indikator dengan Total Capaian PK sebesar 431.49 persen maka rata-rata capaian PK sebesar 86.30 persen dengan demikian predikat PK **"BAIK"**.

Analisis dan evaluasi pada tabel diatas kembali kami jelaskan sebagai berikut :

(1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakan pembangunan.

Sampai dengan Tahun 2024 Realisasi TPAK sebesar 68,25 persen, dengan capaian sebesar 110,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar 62 persen, selanjutnya untuk mengetahui angka TPAK pada tahun 2024 data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Karimun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	100.977	95.932	196.909
I. Angkatan Kerja	83.847	50.536	134.383
1. Bekerja	79.211	47.758	126.969
2. Pengangguran Terbuka	4.636	2.778	7.414
II. Bukan Angkatan Kerja	17.130	45.396	62.526
1. Sekolah			
2. Mengurus Rumah tangga			
3. Lainnya			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,04	52,68	68,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,53	5,50	5,52

Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2024

Sebgaimana tabel diatas bahwa (1) bekerja sebanyak 126.969 orang, (2) pengangguran terbuka sebanyak 7.414 orang, maka (1) + (2) disebut jumlah angkatan kerja sebanyak 134.383 orang, sementara Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)

sebanyak 196.909 orang, maka TPAK pada Tahun 2024 sebesar **68,25 persen** atau sebagaimana rumus berikut :

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun Keatas)}} \times 100 \% = 68,25 \%$$

134.383
196.909

(2) Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja

Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja didapat dari Perusahaan yang setiap tahun melaporkan data-data perusahaan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan. Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Menurut Undang-undang, setiap perusahaan memang memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahunnya secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja sebesar 97,13 persen, dengan capaian sebesar 99,36 persen dari target yang ditetapkan sebesar 97,75 persen, sementara Realisasi pada Tahun 2024 bahwa Jumlah keseluruhan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Perusahaan Wajib Lapo sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Perusahaan Wajib Lapo Tahun 2024

NO	PERUSAHAAN / SEKTOR	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				JUMLAH	KET
			TKA		TKI			
			L	P	L	P		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PERTAMBANGAN	9	9	2	2113	118	2242	
2	PERKAPALAN/ SHIPYARD	9	451	0	4626	148	5225	
3	MINYAK & GAS	6	0	0	101	13	114	
4	PERHOTELAN	35	12	0	270	116	398	
5	PERKEBUNAN	4	0	0	262	142	404	
6	JASA/ KONSTRUKSI	336	92	1	9215	510	9818	
7	PELAYARAN	10	0	0	291	35	326	

8	SWALAYAN/CAFÉ/DEPT. STORE/TOKO	13	0	0	112	141	253	
10	PERBANKAN	14	0	0	291	223	514	
11	PERUMAHAN/DEVELOPER	3	0	0	14	42	56	
12	RUMAH SAKIT/KESEHATAN	5	0	0	138	248	386	
	JUMLAH	444	564	3	17433	1736	19736	
	TOTAL		567		19.169			

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab Karimun 2024

Sebagaimana tabel diatas bahwa jumlah Tenaga Kerja Lokal sebanyak 19.169 orang, sementara jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 567 orang, maka jumlah keseluruhan tenaga kerja sebanyak 19.736 orang, maka perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan keseluruhan tenaga kerja terealisasi sebesar 97,13 persen atau sebagaimana rumus berikut :

$$\text{Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Lokal 19.169 orang}}{\text{Jumlah Keseluruhan Tenaga Kera 19.736 orang}} \times 100\% = 97,13 \%$$

(3) Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk

Penyerapan tenaga kerja di suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Penyerapan tenaga kerja khususnya pada sektor industri kecil dan Menengah di Kabupaten Karimun sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat apalagi dengan diiringi jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. hal ini perlu diperhatikan karena dengan berkurangnya penyerapan tenaga kerja akan menyebabkan permasalahan yaitu pengangguran yang akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi.

Sampai dengan Tahun 2024 Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk terealisasi sebesar 0,67 Persen, dengan capaian sebesar 121,81 persen dari target yang ditetapkan sebesar 0,55 persen, terelisasinya Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Pertumbuhan IKM Tahun 2024

NO	KECAMATAN	IKM
(1)	(2)	(10)
1	KARIMUN	287
2	MERAL	238
3	MERAL BARAT	119
4	TEBING	274
5	KUNDUR	232
6	KUNDUR BARAT	111
7	KUNDUR UTARA	93
8	BURU	131
9	MORO	123
10	DURAI	42
11	BELAT	32
12	UNGAR	85
13	SUGIE BESAR	0
14	SELAT GELAM	0
TOTAL		1767

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab Karimun 2024

Sementara jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5 .Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
135.057	128.287	263.344

Sumber : BPS Tahun 2024

Sebagaimana tabel tersebut diatas bahwa sampai dengan tahun 2024 pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebanyak 1.767 IKM, sementara Jumlah Penduduk berjumlah 263.344 jiwa, maka perhitungan sesuai formula berikut :

Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk

=

Jumlah IKM
1.767

Jumlah Keseluruhan Tenaga Kera
263.344

X 100% = 0,67%

(4) Nilai Akip

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Untuk Nilai Akip tahun 2024 dengan target nilai Akip sebesar 73 belum diterbitkan Inspektorat, namun dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2023 Nilai Akip dengan target 73 dan terealisasi sebesar 60,98 (B),

(5) Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin

Manajemen risiko (MR) adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan mengurangi risiko kerugian, maka kematangan Manajemen Resiko (MR) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Karimun Terealisasi dengan Level sebesar 3,142 dengan capaian sebesar 104,73 persen dari target yang ditetapkan sebesar Level 3.

III.1 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	(1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68.25	65,27	104.56
		(2) Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	97.13	91,65	105.97
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	(3) Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0.67	0,67	100

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	(4) Nilai Akip	Sudah jelas	Belum diterbitkan Inspektorat	73	
----	---	----------------	-------------	-------------------------------	----	--

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa untuk Sasaran Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah terbagi dua Indikator yakni 1) Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sampai dengan tahun 2024 terealisasi sebesar 68,25 persen, sementara target yang ditetapkan sebesar 65,27 persen, dengan tingkat kemajuan sebesar 104,56 persen atau melebihi dari target yang telah ditetapkan pada akhir renstra tahun 2026, 2) Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja sampai dengan tahun 2024 terealisasi sebesar 97,13 persen, dengan tingkat kemajuan sebesar 105,97 persen dari target yang ditetapkan sebesar 91,65 persen dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada akhir renstra 2026, untuk sasaran Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat dengan indikator Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk sampai dengan tahun 2024 terealisasi sebesar 0,67 persen dengan tingkat kemajuan sebesar 100 persen dari target akhir renstra 2026 sebesar 0,67 persen, pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin dengan indikator Nilai Akip dapat kami jelaskan bahwa nilai Akip untuk tahun 2024 belum diterbitkan oleh Inspektorat.

III.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,21	60,46	98,77	61.50	64.79	105.35	62	68,25	110.08

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

	Tenaga Kerja di Daerah	Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	91,45	99,60	108,91	97,75	95,79	97,99	97,75	97,13	99,36
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,66	0,61	92,42	0,50	0,63	126	0,55	0,67	121,81
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	Nilai	73	50,89 (CC)	68,60%	73	60,98 (B)	83,53%	73	Belum terbit	
		Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level							3	3,142	104,73

Dari tabel diatas untuk sasaran Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah terbagi 2 (dua) indikator yakni 1) Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 68,25 persen dan terjadi peningkatan di banding pada tahun 2023 sebesar 64,79 persen dan tahun 2022 sebesar 60,46 persen , 2) Indikator Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 97,13 persen terjadi Fluktuasi yang mana pada tahun 2023 terealisasi sebesar 95,79 persen dan tahun 2022 terealisasi sebesar 99,60 persen, untuk Sasaran Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat dengan indikator Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,67 persen, sementara tahun 2023 terealisasi sebesar 0,63 persen dan tahun 2022 sebesar 0,61 persen, pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin terbagi 2 (dua) indikator yakni 1) Indikator Nilai Akip bahwa untuk tahun 2024 belum diterbitkan Inspektorat, namun pada tahun 2023 nilai Akip sebesar 60,98 (B) terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 50,89 (CC), 2) untuk indikator Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin baru kami tuangkan pada perjanjian kinerja pada Tahun 2024 dengan target sebesar Level 3, sementara teralisasi sebesar Level 3,142 dengan capaian sebesar 104,73 persen.

III.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan :

Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Angkatan Kerja [dibagi] Jumlah Penduduk Usia Kerja [dikali] 100 persen	Persen	62	68,25	110,08
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Jumlah Seluruh tenaga kerja [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja Lokal [dikali] 100 persen	Persen	97,75	97,13	99,36
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah IKM [dibagi] Jumlah Penduduk [dikali] 100 persen	Persen	0,55	0,67	121,81
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	Sudah jelas	Nilai	73	Belum terbit	
		Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Sudah jelas	Level	3	3,142	104,73%

Analisis Keberhasilan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada Tahun 2024 TPAK sebesar 68,25 persen meningkat dibanding pada tahun 2023 sebesar 64,79 persen, peningkatan TPAK sangat berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka, yang mana pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karimun sebesar 5,52 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 6,02 persen. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun perekonomiannya semakin membaik.

Membuka kesempatan Kerja di Kabupaten Karimun sehingga perusahaan dapat menyerap tenaga kerja dalam permintaan yang besar, karna semakin tinggi angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

2. Rasio Tenaga Kerja Lokal terhadap seluruh Tenaga Kerja

Pada dasarnya, Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah segenap upaya agar memajukan serta meningkatkan penanaman uang dan modal atau investasi, bertukar pengetahuan dalam teknologi (Transfer Technology), dan bertukar kemampuan dalam skill (Transfer Skill) kepada Tenaga Kerja dalam negeri yang menjalin kerjasama antar negara. Oleh karenanya, penanam uang dan modal atau investor di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan dasar penetapan putusan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberi perlindungan tenaga kerja dengan menjamin hak penting buruh dan pekerja, kesamaan dalam mendapatkan pekerjaan serta perlakuan tidak diskriminasi terhadap dasar lainnya guna menciptakan kesejahteraan bagi buruh, pekerja, dan keluarga dengan tetap melihat perkembangan serta perkembangan dunia investasi dan usaha.

3. Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk

Dalam membangun IKM yang mampu bersaing seiring dengan peningkatan perekonomian dan pengurangi pengangguran ada beberapa modal yang harus disiapkan, baik disiplin pelaku IKM itu sendiri maupun pemerintah diantaranya :

1. *Human Capital* (Modal Manusia) sering juga disebut dengan modal sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting dipersiapkan untuk membangun IKM yang dunia usaha dan yang sudah sangat kompetitif.
2. *Phsyical Capital* adalah pentingya modal fisik bagi berkelanjutan usaha IKM, meliputi ketersediaan infrastruktur dasar, seperti ketersediaan transportasi, air bersih, alat komunikasi serta peralatan produksi lainnya.
3. *Social Capital* atau modal sosial yaitu bagaimana pelaku IKM juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, melayani customer dengan baik dengan selalu meningkatkan mutu dan pelayanan.
4. *Financial Capital*, bagaimana mengatur keuangan, menambah permodalan untuk perluasan usaha, akses ke perbankan termasuk penting untuk pengembangan IKM.
5. *Natural Capital*, bagaimana pelaku IKM mampu beradaptasi dengan lingkungan usaha dimana dia melakukan aktivitas usaha.

Beberapa komponen diatas merupakan faktor-faktor IKM tetap tumbuh dan berkembang, dengan berkembangnya IKM otomatis perekonomian meningkat dan pengangguran akan menurun.

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun yang tidak terlepas dari pentingnya dukungan Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan pergerakan upaya untuk pengembangan IKM diantaranya :

1. Pengembangan IKM diupayakan sejalan dengan penguatan struktur industri dengan memperbesar keterkaitan antara industri besar dengan IKM, melalui insentif kepada industri besar agar lebih melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
2. Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan mendorong perbankan menciptakan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan mengakomodir sifat IKM.
3. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui *procurement* dan pemasaran bersama.
4. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak paten bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
5. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
6. Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding;
7. Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM;
8. Peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi penerapan standar produk-produk IKM.

4. Nilai AKIP

Adapun Nilai Akip Tahun 2024 belum diterbitkan Inspektorat.

5. Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin

Manajemen risiko (MR) adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan mengurangi risiko kerugian.

III.4 Penjenjangan Perjanjian Kinerja / Analisis Program yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Penjenjangan Perjanjian Kinerja/Analisis Keberhasilan Program Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja sebagaimana tabel berikut :

3.9 Penjenjangan Perjanjian Kinerja

PK ESELON II						PK ESELON III					
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62%	68,25%	110,08%						
		2. Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	97,75%	97,13%	99,37%						
						Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	53.57 %	32.36 %	60.40 %
						Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	46.75 %	95.79 %	204.92 %
						Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Program Hubungan Industrial	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	3 kasus	1 Kasus	166.67 %
								Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata kelola Kerja yang layak (PP, PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit)	80 %	72,08 %	90,10 %
2	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap Jumlah penduduk	0,55%	0,67%	121,82%	Meningkatnya Berwirausaha Bagi IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	4,50 %	4,91%	109,11 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	73 Nilai	Belum Terbit		Meningkatnya Capaian Kinerja Disnakerind	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase IKU Yang Mencapai Target	95%	109%	114.74%
		Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level 3	Level 3, 142				Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	90 Nilai	80 Nilai	91,21%
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	80 Nilai	100%

Sebagaimana tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mendorong pemasyarakatan dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja agar tersedianya tenaga kerja yang **berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi** baik dipasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Indikator Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yakni Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan formula ***Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi [dibagi] jumlah tenaga kerja keseluruhan [dikali] 100 persen***, dengan formula tersebut maka pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebanyak 951 orang, sementara jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 2.939 orang, maka terealisasi sebesar 32.36 persen dengan capaian 60.40 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 53.57 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk :

- a. Mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha dan meningkatkan peranan devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri dalam upaya memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha.

Indikator Program Penempatan Tenaga Kerja yakni Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dengan formula ***Jumlah pencaker/pencari kerja yang ditempatkan [dibagi] jumlah pencaker yang mendaftar [dikali] 100 persen***, maka sesuai formula bahwa jumlah pencaker/pencari kerja pada tahun 2024 sebanyak 1.140 orang, sementara yang ditempatkan sebanyak 1.092 orang, dan terealisasi sebesar 95,79 persen, dengan capaian sebesar 204,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar 46,75 persen.

3. Program Hubungan Industrial.

Program Hubungan Industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut, dengan hubungan industrial yang dibangun, maka akan tercipta kondisi yang aman, harmonis, serasi, dan sejalan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Selanjutnya, perusahaan juga dapat terus meningkatkan produktivitas dalam usahanya dan pihak lain akan mendapatkan kesejahteraan.

Indikator Program ini terbagi 2 (dua) yakni :

1. Indikator Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi (Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan industrial), untuk itu pada tahun 2024 jumlah kasus yang tercatat sebanyak 3 kasus, sementara kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator hubungan industrial sebanyak 1 kasus, maka penghitungan sesuai formula yakni *target [kali] 2 [dikurang] realisasi [dibagi] target [dikali] 100 persen*, maka hasil sesuai formula yakni $\text{target (3) [dikali] 2 = 6 [dikurangi] realisasi (1) = 5 [dibagi] target [3] [dikali] 100 \text{ persen} = 166,67 \text{ persen}$.
2. Indikator *Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata kelola Kerja yang layak*, Indikator ini Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2024 Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 616 Perusahaan, sementara Jumlah perusahaan sebanyak 444 perusahaan, maka terealisasi sebesar 72,08 persen dengan capaian kinerja sebesar 90,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar 80 Persen

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini bertujuan mendorong kemampuan para perajin yang sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah perubahan pasar yang cukup fluktuatif saat ini, dengan indikator Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah baik di dalam maupun luar negeri.

Indikator Program tersebut diatas dengan formula ***jumlah industri kecil dan menengah tahun ini [dikurang] jumlah industri kecil dan menengah tahun lalu***

[dibagi] jumlah industri kecil dan menengah tahun lalu [dibagi] 100 persen, maka jumlah IKM tahun ini sebanyak 1773 IKM [dikurangi] IKM tahun lalu sebanyak 1690 IKM = 83 IKM dibagi IKM tahun lalu 1690 IKM [dikali] 100 persen, maka hasil/realisasi sebesar 4,91 persen, dengan capaian sebesar 109,11 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,50 persen.

III.5 Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Pejabat Yang Dinilai Eselon II

Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Pejabat yang dinilai Eselon II sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.10 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahun 2024 dengan Pejabat Yang Dinilai Eselon II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	53.57%	32.36%	60.40%	60.40%	15%	51%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12ygodVr23ECQCmEbD_7kFpMpeOB_vrE5
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	46.75%	95.79%	204.92%	110%	15%	94%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r29oncNKOeJQozBMbWtdYNdRht_e6QWk
3	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	3 kasus	1 Kasus	166.67%	110%	15%	94%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tj-l9Wcurhw6MSUAKCBw0FrH6ld8vqj
		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata kelola Kerja yang layak (PP,PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit)	80%	72,08 %	90.10%	90.10%	15%	77%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xXoxkrYjB8N5qmjZxqVj3iA3MzBoekSz
4	Meningkatnya Berwirausaha Bagi IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	4.50%	4.91%	109.11%	109.11%	15%	93%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1syekYI3dCKWgazfYpDtIsY334Vedp8L
5	Meningkatnya Capaian Kinerja Disnakerind	Persentase IKU Yang Mencapai Target	95%	109%	114.74%	110%	15%	94%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k022hPmxENa4otfth3y72YQ31JaBK7W-
		Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	90 Nilai	80 Nilai	91.21%	91.21%	15%	78%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qmITHW9XzNW62h1MX0Lbolwq4q-1zOBk
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	80 Nilai	100%	100%	15%	85%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tWhgA6X445Dc8NUmAuw3r_N-uckgDey-
TOTAL CAPAIAN PK								663.70%	
RATA - RATA CAPAIAN PK								82.96%	
PREDIKAT PK								BAIK	

III.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran kinerja strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten Karimun dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2022	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.067.484.000	4.370.290.516	481 Orang Peserta	433 Orang Peserta	20 % Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	17 % Jlh tenagakerjayg mengikuti pelatihan 433 orang [dibagi] Jlh yg mendaftar 2463 orang [dikalij] 100 persen	Efisiensi penggunaan sumber daya jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada Programdan Kegiatan : A. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terbagi 2 (dua) Kegiatan yakni : 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi lebih besar anggaran tahun 2022 dibanding tahun 2023 dan tahun 2024, jika anggaran lebih besar maka pelaksanaan pelatihan bagi peserta akan bertambah, bisa dilihat pada outputnya. 2. Kegiatan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota efesiensi sumber daya terjadi di tahun 2024, dibanding tahun 2022 dan tahun 2023. B. Program Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2022 terbagi 2 (dua) kegiatan, sementara pada tahun 2023 dan tahun 2024 terbagi 3 (tiga) Kegiatan : 1. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota. Pada tahun 2022 kegiatan tidak ada, namun kegiatan tersebut muncul tahun 2023 dan tahun 2024, namun terjadi efisiensidi tahun 2024. 2. Untuk kegiatan pengelolaan Informasi pasar kerja efesiensi penggunaan anggaran terjadi di tahun 2024 yang sangat signifikan dibanding tahun 2022 dan tahun 2023. 3. Kegiatan Retribusi penerbitan IMTA terjadi perubahan kegiatan di tahun 2024 yakni kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah,
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	42.000.000	40.461.700	1 Laporan	1 Laporan	47,63% Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	47,22% Jlh Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 34 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan 72 Perusahaan [dikalij] 100 persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	36.000.000	35.776.500	1 Laporan	1 Laporan	100 Jumlah Lowongan yang tersedia	133 Jumlah Lowongan yang tersedia	
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	49.584.000	49.507.126	1 Laporan	1 Laporan	30 Orang Izin Perpanjangan TKA	22 Orang Izin Perpanjanagn TKA	
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	265.434.000	264.923.564	1 Laporan	1 Laporan	35,22% 1. Persentase Perusahaan yang telah memiliki PP	21,34% 1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 35 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 179 Perusahaan [dikalij] 100 persen	
							85% 2. Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	148,78% 2. Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah : 61 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 41 Perusahaan [dikalij] 100 persen	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

							100% 3. Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100% 3. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun: 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen	serta efisiensi penggunaan anggaran menurun dibanding tahun 2023 dan tahun 2023.
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	54,000,000	54,000,000	1 Doku Hasil Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen	1 Dokumen Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	C. Program Hubungan Industrial Pada Program Hubungan Industrial pada Tahun 2024 terbagi 2 (dua) kegiatan sementara pada tahun 2022 dan tahun 2023 hanya 1 (satu) Kegiatan : 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, lebih besar di tahun 2023 dibanding tahun 2022 dan tahun 2024. 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran sebesar 90,98 persen, dengan outcome mewujudkan hubungan industrial yang harmonis (menghindari permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan agar kabupaten karimun tetap kondusif).
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	740,000,000	669,922,635	105 Orang Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	105 Orang Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	0,60 % Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0,56 % Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan Pembinaan (9 kelompok Pengrajin) [dibagi] Jumlah kelompok pengrajin (1621 Kelomok Pengrajin) [dikali] 100 persen	
2023	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Kerja	1,445,100,249,-	1,267,690,409,-	119 Orang Peserta	109 Orang Peserta	30 Persen Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	49,32 persen Jumlah peserta yg ikut pelatihan 109 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 221 orang [dikali] 100 persen	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	49,000,000,-	40,861,623,-	1 Laporan	1 Laporan	45 Persen Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	40 Persen Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 16 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan 40 Perusahaan [dikali] 100 persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	244,999,508	240,267,090	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	100 Persen Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis wirausaha baru (TKM, TTG) 60 orang [dibagi] Jumlah yang mendaftar pelatihan berbasis wirausaha baru (TKM, TTG) 60 Orang [dikali] 100 persen	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	51,199,357,-	40,260,139,-	1 Laporan	1 Laporan	150 Jumlah Lowongan yang tersedia	215 Jumlah Lowongan yang tersedia	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	51,188,367	41,717,183	1 Laporan	1 Laporan	150 Orang Izin perpanjangan TKA	102 Orang Izin perpanjangan TKA	
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	321,249,665	185,907,513	1 Laporan	1 Laporan	35,22% 1. persentase perusahaan yang telah memiliki PP	33,33% 1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 47 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 141 Perusahaan [dikalij] 100 persen	
							95% 2. Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	137,04% 2. Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah : 74 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 5 4 Perusahaan [dikalij] 100 persen	
							100 % 3. Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100% 3. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikalij] 100 persen	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	139,998,921	201,657,850	1 Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1 Dokumen	1 Dokumen Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	663,471,908	117,386,650	30 Orng Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	30 Orang Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan pelatihan	4,50 % Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	4,38 % Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan Pembinaan (74 kelompok Pengrajin) [dibagi] Jumlah kelompok pengrajin (1690 Kelomok Pengrajin) [dikalij] 100 persen	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/K	49,999,228	49,944,586	1 Dokumen Dokumen Hasil Fasilitas Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI	1 Dokumen Hasil Fasilitas Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI	1 Dokumen	1 Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

		ota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			IPUI, IUKI dan IPKI				
2024	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,587,223,000,-	1,434,806,131,-	136 Orang Peserta	136 Orang Peserta	11.50 % Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	10, 57 % Jumlah peserta yg ikut pelatihan 136 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 1.287 orang [dikal] 100 persen	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	7,992,200,-	3,714,893,-	1 Laporan	1 Laporan	42 % Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	47,06 % Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 16 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan 40 Perusahaan [dikal] 100 persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	103,900,000,-	102,324,923,-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 % Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	0 Efisiensi Anggaran	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10,332,000,-	10,317,000,-	1 Laporan	1 Laporan	250 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan	308 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	9,422,000,-	9,422,000,-	1 Laporan	1 Laporan	15 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri	15 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri	
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	254,128,520,-	225,516,576,-	1 Laporan	1 Laporan	16 % Persentase perusahaan yang telah memiliki PP	14,88 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 32 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 215 Perusahaan [dikal] 100 persen	
							100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikal] 100 persen	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	153,952,000,-	140,070,000,-	1 Laporan	1 Laporan	75 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	71,43 % (Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat [dikal] 100 persen)	
							1,75 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	1,58 % (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi]	

		di Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah Perusahaan Wajib Laport tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen	
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis, maka terdapat 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp.	%	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,931,945,866	4,776,243,336	96.84	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,108,000	25,090,000	99.93	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,508,000	11,490,000	99.84	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,600,000	7,600,000	100.00	100
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	6,000,000	100.00	100
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,920,235,866	3,876,739,938	98.89	
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,829,731,866	3,810,589,938	99.50	100
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,504,000	66,150,000	73.09	100
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391,053,000	360,765,179	92.25	
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	1,765,000	88.25	100
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224,933,000	215,784,850	95.93	100
	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,999,000	4,083,000	58.34	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,730,000	3,600,000	46.57	100
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,775,000	2,700,000	97.30	100
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146,616,000	132,832,329	90.60	100
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		512,540,000	451,913,619	88.17	
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,040,000	29,038,619	100.00	100
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483,500,000	422,875,000	87.46	100
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		83,009,000	61,734,600	74.37	
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,380,000	37,136,600	72.28	100
		15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,539,000	10,788,000	69.43	100
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,090,000	13,810,000	85.83	100
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1,595,215,200	1,438,521,024	90.18	
	6	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		1,587,223,000	1,434,806,131	90.40	
		17	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,587,223,000	1,434,806,131	90.40	100
		18	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	-	#DIV/0!	
	7	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7,992,200	3,714,893	46.48	
		19	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	7,992,200	3,714,893	46.48	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			123,654,000	122,063,923	98.71	
	8	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		103,900,000	102,324,923	98.48	
		20	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	59,422,000	59,106,000	99.47	100
		21	Perluasan Kesempatan Kerja	44,478,000	43,218,923	97.17	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

	9	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		10,332,000	10,317,000	99.85	
		22	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	10,332,000	10,317,000	99.85	100
	10	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		9,422,000	9,422,000	100.00	
		23	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	9,422,000	9,422,000	100.00	100
	11	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		254,128,520	225,516,576	88.74	
		24	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	254,128,520	225,516,576	88.74	100
	13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		153,952,000	140,070,000	90.98	
		25	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	153,952,000	140,070,000	90.98	100
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			186,160,500	184,145,500	98.92	
	14	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		186,160,500	184,145,500	98.92	
		26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	133,950,000	133,950,000	100.00	100
		27	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	52,210,500	50,195,500	96.14	100
TOTAL				7,245,056,086	6,886,560,359	95.05	100

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini dimaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun 2022-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 2 (dua) sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja, sasaran ke 1 (satu) terdapat 2 (dua) Indikator, yang mana sasaran pertama capaian kinerja sebesar 105,35% atau kategori sangat tinggi, sementara yang kedua dengan capaian sebesar 97,99% atau kategori sangat tinggi, sasaran kedua hanya 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebesar 126% dengan mencapai kategori sangat tinggi.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Tercapainya Sasaran OPD

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, disertai dengan tindaklanjut atas rekomendasi hasil review terhadap kinerja Dinas;

2. Komitmen dan integritas pemimpin bersama jajarannya dalam bekerjasama dan bekerja bersama-sama, dengan memaksimalkan perannya dalam mewujudkan tujuan/sasaran Dinas;
3. Intensitas koordinasi, konsultasi dan komunikasi stakeholders dalam membangun sinergitas tercapainya sasaran Dinas berdasarkan porsi masing-masing;
4. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, sebagai sarana pendukung kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

C. Rekomendasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan ke depan dalam pencapaian kinerja

1. Peningkatan kualitas/mutu pelatihan kerja sesuai dengan standard dan benar-benar dibutuhkan oleh pasar kerja.
2. Peningkatan Pelayanan penempatan tenaga kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja.
3. Peningkatan perlindungan hak-hak pekerja
4. Optimalisasi implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada perusahaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga lapran ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Berikut Pengukuran Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Base Line 2021	Realisasi		Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
						2022	2023	Target	Realisasi		
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Penduduk Bekerja [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100 persen	Persen	60,86	60,46	64,79	62	68,25	65,27	104,56%
		Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Lokal [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja [dikali] 100 persen	Persen	95,45	99,60	95,79	97,75	97,13	91,65	105,98%
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk [dibagi] jumlah IKM [dikali] 100 persen	Persen	0,60	0,61	0,63	0,55	0,67	0,67	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	<i>Sudah jelas</i>	Nilai	69,92 (B)	50,08 (CC)	60,98 (B)	73	<i>Belum Terbit</i>	73	69,71%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AUNUR RAFIQ
Jabatan : BUPATI KARIMUN
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KARIMUN



H. AUNUR RAFIQ

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**



Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62%
		2.	Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	97,75 %
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	3.	Rasio Pelaku Usaha (IKM) Terhadap Jumlah Penduduk	0,55%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	4.	Nilai Akip	73 Nilai
		5.	Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level 3

PROGRAM

ANGGARAN

1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.889.053.540,-
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1.865.842.000,-
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	298.639.656,-
4.	Hubungan Industrial	Rp.	607.410.520,-
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	393.605.200,-
TOTAL ANGGARAN		Rp.	8.054.550.916,-

Tanjung Balai Karimun, 15 Januari 2024

BUPATI KARIMUN,

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**


H. AUNUR RAFIQ


Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc

**RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDDSUTRIAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
A	Urusan Perindustrian								
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		PDRB Perkapita	Jt (RP)	62,74	65,94	69,32	72,86	76,59
		Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67
B	Urusan Ketenagakerjaan								
2.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6.90	6,60	6,35	6,15	5,80
		Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,21	62,45	63,71	64,17	65,27
			Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00
		Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	Nilai	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

POHON KINERJA
MISI 3
URUSAN KETENAGAKERJAAN

Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif

Indikator

- 1). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 2). Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja

Masih Terbatasnya Skill Tenaga Kerja Lokal Sehingga Perlu Peningkatan SDM

Indikator

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Kompetensi Tenaga Kerja Lokal Yang Meningkat

Indikator

Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi

Indikator

Jumlah Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan

Sarana Yang Mendukung

Indikator

Persentase Sarana Dalam Kondisi Baik

Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

Indikator

Jumlah Unit

Produktivitas Perusahaan Meningkat

Indikator

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas

Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan

Indikator

Jumlah Perusahaan Yang Mengikuti Sosialisasi

Pendataan Penerapan Program Peningkatan Produktivitas Pada Perusahaan

Indikator

Data Perusahaan

Tingginya Angkatan Kerja Tidak Diimbangi Dengan Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan

Informasi Pasar Kerja

Indikator

- 1). Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Lowongan Pekerjaan
- 2). Jumlah CPMI yang

Penyelenggaraan Media Informasi Lowongan Kerja

Indikator

Jumlah Pencaker yang Terdaftar Pada Media Informasi Lowongan Kerja

Penyelenggaraan Job fair

Indikator

Jumlah Pencaker yang Mendaftar Pada *job fair*

Koordinasi dan Konsultasi Perusahaan CPMI

Indikator

Jumlah Perusahaan CPMI

Perluasan Berwirausaha Meningkat

Indikator

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis wirausahabaru

Pelatihan Calon Wirausaha baru (TKM, TTG)

Indikator

Jumlah Calon Wirausahabaru

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Indikator

Jumlah Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penyelenggaraan Pelayanan Perpanjangan RPTKA

Indikator

1. Jumlah Perusahaan Pengguna TKA
2. Jumlah TKA

Penerapan Norma Ketenagakerjaan yang Belum Optimal

Indikator

- 1) Penyelesaian Kasus yang di Fasilitas
- 2) Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan (PP,PKB, Struktur Skala Upah)

Penyelesaian Permasalahan / Isu Ketenagakerjaan Antar Lembaga (Pemerintah, LKS Tripartit, SP/SB, Pengusaha) untuk Menciptakan Suasana Yang Kondusif

Indikator

- 1) Persentase perusahaan yang berselisih
- 2). Persentase Kasus Yang di Selesaikan Melalui Perundingan Bipartit (BP)

Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Indikator

Jumlah Kasus yang Tercatat

Pemahaman Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan/Hak-Hak Pekerja Terpenuhi

Indikator

- 1). Persentase Perusahaan yg Memiliki PP
- 2) Persentase perusahaan yang Memiliki PKB
- 3). Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah

Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan

Indikator

Jumlah Perusahaan

Verifikasi, PP, PKB dan Struktur Skala Upah

Indikator

Jumlah PP, PKB dan Struktur Skala Upah Yang Terverifikasi

Pendataan Sarana Hubungan Industrial

Indikator

Jumlah Dokumen

Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun

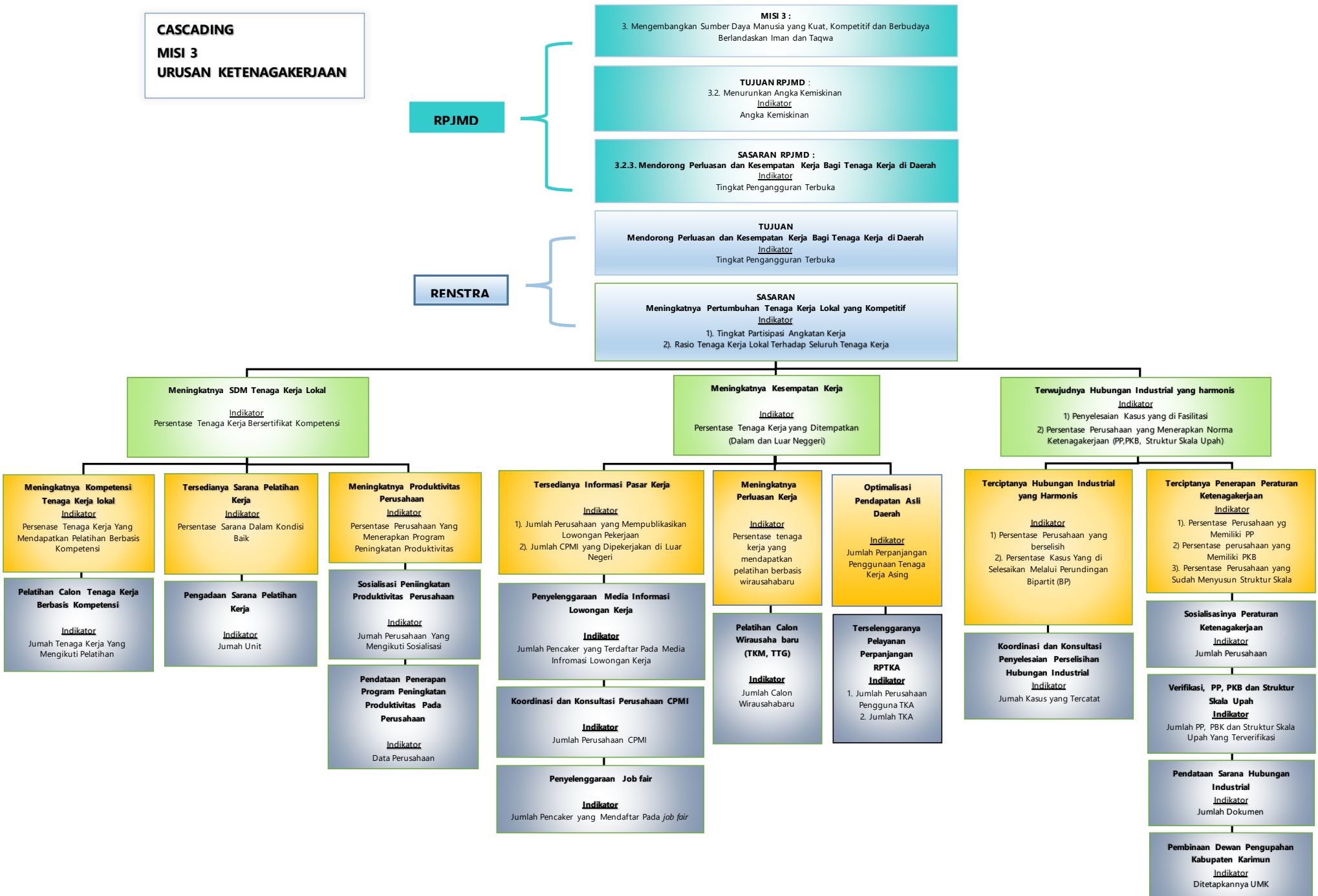
Indikator

Ditetapkannya UMK

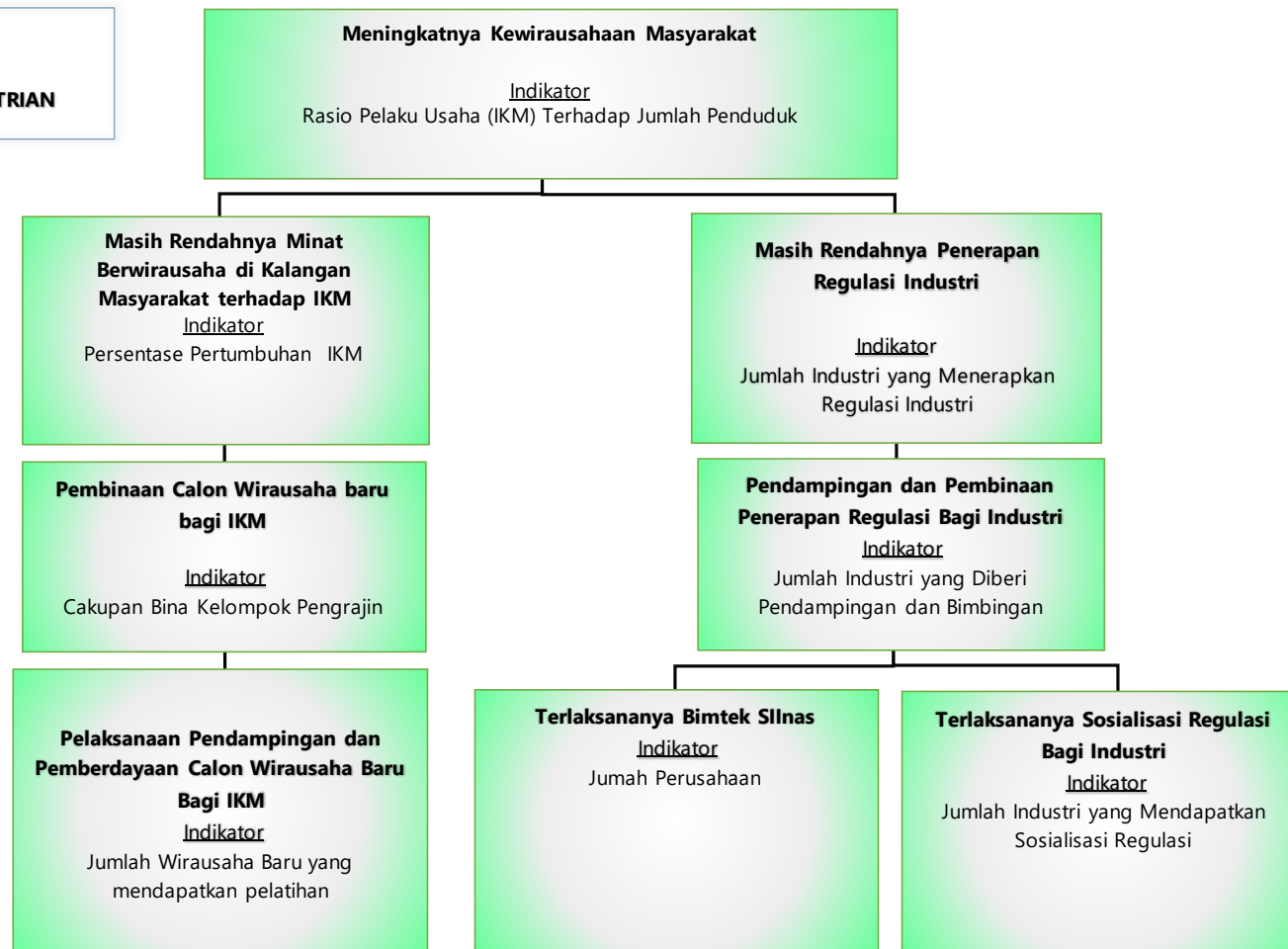
CASCADING
MISI 3
URUSAN KETENAGAKERJAAN

RPJMD

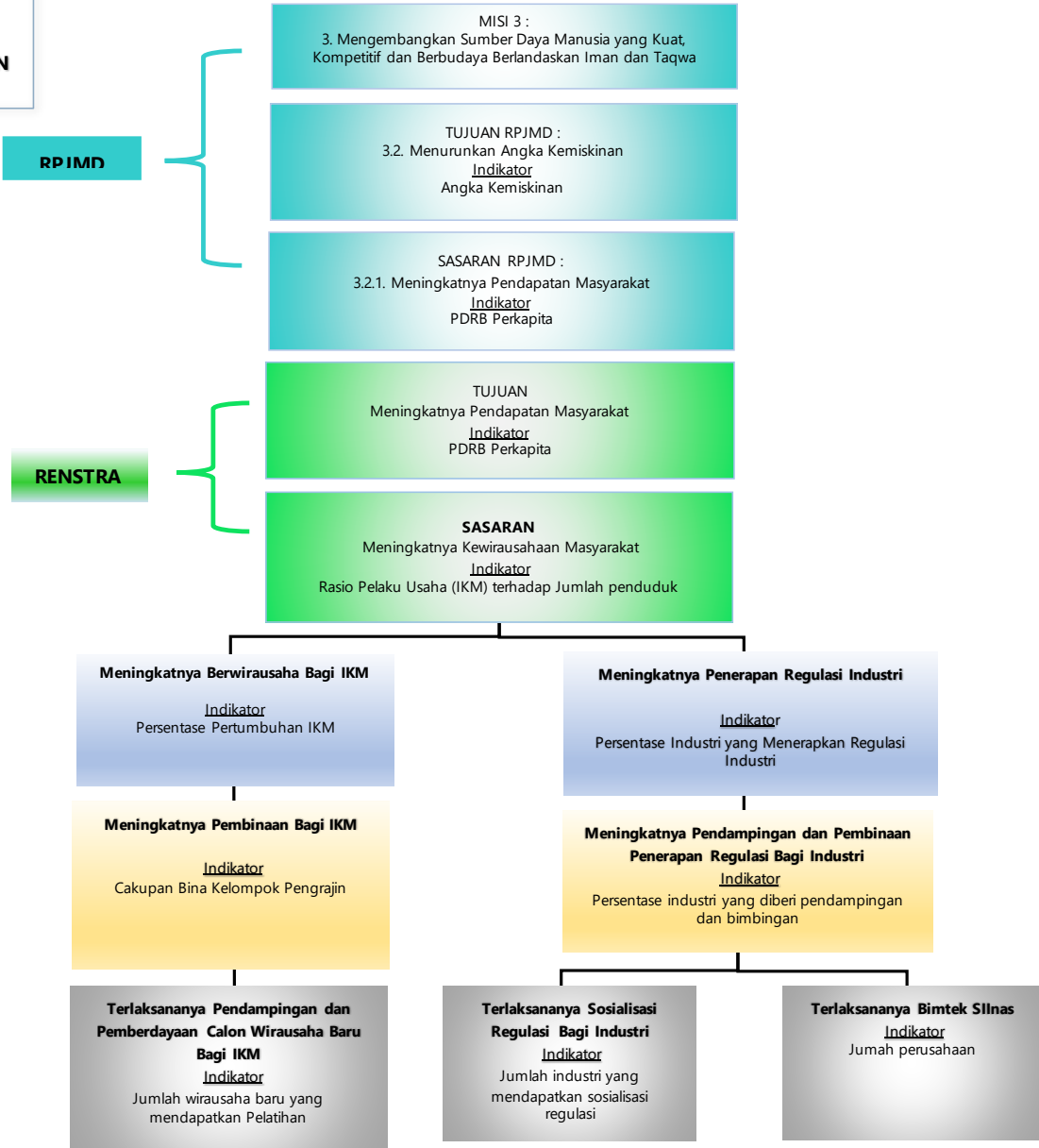
RENSTRA



POHON KINERJA
MISI 3
URUSAN PERINDUSTRIAN



CASCADING
MISI 3
URUSAN PERINDUSTRIAN



MISI 5

POHON KINERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)

Indikator

Indeks Reformasi Birokrasi

Kualitas Pelayanan Publik

Indikator

Indeks Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator

Nilai AKIP OPD

Capaian Kinerja OPD

Indikator

- 1). Persentase IKU OPD yang mencapai target
- 2). Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti
- 3). Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Kinerja Perencanaan OPD

Indikator

- 1). Nilai Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD
- 2). Persentase capaian program OPD
- 3). Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD
- 4). Persentase Realisasi Fisik kegiatan OPD

Koordinasi Perencanaan OPD

Indikator

- 1). Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
- 2). Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD

Dokumen Perencanaan OPD tersedia

Indikator

Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun

Dokumen penganggaran OPD tersedia

Indikator

- 1). Jumlah RKA yang disusun
- 2). Jumlah DPA yang disusun

Data/Informasi penyelenggaraan pemerintahan di OPD tersedia

Indikator

- 1). Jumlah data yang dikelola
- 2). Jumlah dokumen perencanaan yang di publish

Monev Dokumen Perencanaan OPD secara berkala

Indikator

- 1). Jumlah laporan hasil evaluasi Renja

Laporan kinerja berbasis TIK sebagai bahan evaluasi

Indikator

- 1). Ketepatan waktu pelaporan TEPR
- 2). Ketepatan waktu pelaporan RUP
- 3). Jumlah kegiatan yang terlaksana

Laporan Kinerja OPD sebagai bahan evaluasi

Indikator

Jumlah laporan kinerja yang disusun

Kinerja Keuangan OPD

Indikator

- 1). Persentase kegiatan yang anggarannya terealisasi $\geq 95\%$
- 2). Persentase serapan anggaran OPD

Dokumen Pengelolaan pencairan anggaran tersedia lengkap

Indikator

- 1). Jumlah SPP yang terbit
- 2). Jumlah SPM yang terbit

Dokumen pertanggungjawaban keuangan diverifikasi

Indikator

- 1). Jumlah SPJ yang diverifikasi
- 2). Jumlah laporan verifikasi

Dokumen laporan pengelolaan keuangan tersedia

Indikator

Jumlah laporan keuangan yang disusun

Kinerja Pegawai OPD

Indikator

- 1). Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif
- 2). Rata-rata capaian kinerja Pegawai Nakerind
- 3). Jumlah Rencana kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi

Monev Disiplin Pegawai dilaksanakan berkala

Indikator

- 1). Jumlah laporan hasil finger print pegawai
- 2). Jumlah laporan hasil Monev yang dilakukan

Monev Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilaksanakan berkala

Indikator

- 1). Jumlah pegawai dengan nilai SKP ≥ 85
- 2). Jumlah pegawai yang menyusun SKP tepat waktu

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator

- 1). Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
- 2). Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
- 3). Jumlah Rencana kebutuhan

Kualitas Pelayanan OPD

Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sarana prasana kerja memadai

Indikator

- 1). Persentase Asset OPD dalam kondisi baik
- 2). Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi
- 3). Persentase realisasi anggaran pengadaan asset

Pengadaan Asset

Indikator

Jumlah Asset yang dibeli

Pengelolaan Asset

Indikator

- 1). Jumlah penghapusan asset
- 2). Jumlah Asset yang di service
- 3). Jumlah Asset yang dikelola

Implementasinya SOP OPD

Indikator

- 1). Persentase SOP yang dilaksanakan
- 2). Persentase kebijakan pelayanan yang

SOP OPD

Indikator

Jumlah SOP yang disusun

Evaluasi SOP secara berkala

Indikator

Jumlah SOP yang direvisi

Sarana pengaduan masyarakat

Indikator

- 1). Jumlah media pengaduan
- 2). Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengelolaan Administrasi umum perkantoran

Indikator

- 1). Persentase surat masuk yang

Pengelolaan Arsip

Indikator

- 1). Jumlah arsip statis yang dikelola
- 2). Jumlah arsip dinamis yang dikelola

Pengelolaan Surat menyurat

Indikator

- 1). Jumlah Surat masuk yang dikelola
- 2). Jumlah surat keluar yang dikelola
- 3). Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti

Pengelolaan urusan Rumah tangga kantor

Indikator

- 1). Jumlah tagihan surat kabar
- 2). Jumlah tagihan listrik, air, internet
- 3). Jumlah peralatan rumah tangga OPD

Pengadaan barang pakai habis

Indikator

- 1). Jumlah barang pakai habis yang dibeli
- 2). Jumlah barang pakai habis yang dikelola

CASCADING

MISI 5

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

MISI 5 :
5. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul

TUJUAN RPJMD :
5.1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK
(GOOD GOVERNMENT)

Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN RPJMD :
5.1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator
Indeks Pelayanan Publik

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator

Nilai AKIP OPD

Meningkatnya Capaian Kinerja OPD

Indikator

- 1). Persentase IKU OPD yang mencapai target
- 2). Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti
- 3). Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD

Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya Kinerja Perencanaan OPD

Indikator

- 1). Nilai Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD
- 2). Persentase capaian program OPD
- 3). Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD
- 4). Persentase Realisasi Risk kegiatan OPD

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan OPD

Indikator

- 1). Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
- 2). Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD

Indikator

Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun

Tersedianya Dokumen penganggaran OPD

Indikator

- 1). Jumlah RKA yang disusun
- 2). Jumlah DPA yang disusun

Tersedianya Data/Informasi penyelenggaran pemerintahan di OPD

Indikator

- 1). Jumlah data yang dikelola
- 2). Jumlah dokumen perencanaan yang di publish

Terlaksananya Monev Dokumen Perencanaan OPD secara berkala

Indikator

- 1). Jumlah laporan hasil evaluasi Renja
- 2). Jumlah laporan hasil Reviu Renstra

Tersedianya Laporan kinerja berbasis TIK sebagai bahan evaluasi

Indikator

- 1). Ketepatan waktu pelaporan TEPR
- 2). Ketepatan waktu pelaporan RUP
- 3). Jumlah kegiatan yang terlaksana

Tersedianya Laporan Kinerja OPD sebagai bahan evaluasi

Indikator

Jumlah laporan kinerja yang disusun

Meningkatnya Kinerja Keuangan OPD

Indikator

- 1). Persentase kegiatan yang anggarannya terealisasi $\geq 95\%$
- 2). Persentase serapan anggaran OPD

Tersedianya Dokumen Pengelolaan pencairan anggaran lengkap

Indikator

- 1). Jumlah SPP yang terbit
- 2). Jumlah SPM yang terbit

Terlaksananya Dokumen pertanggungjawaban keuangan diverifikasi

Indikator

- 1). Jumlah SPJ yang diverifikasi
- 2). Jumlah laporan verifikasi

Tersedianya Dokumen laporan pengelolaan keuangan

Indikator

Jumlah laporan keuangan yang disusun

Meningkatnya Kinerja Pegawai OPD

Indikator

- 1). Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif
- 2). Rata-rata capaian kinerja Pegawai Nakerind
- 3). Jumlah Rencana kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi

Terlaksananya Monev Disiplin Pegawai berkala

Indikator

- 1). Jumlah laporan hasil finger print pegawai
- 2). Jumlah laporan hasil Monev yang dilakukan

Terlaksananya Monev Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berkala

Indikator

- 1). Jumlah pegawai dengan nilai SKP ≥ 85
- 2). Jumlah pegawai yang menyusun SKP tepat waktu
- 3). Jumlah kegiatan monev yang dilakukan

Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator

- 1). Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
- 2). Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

Tersedianya Sarana prasana kerja memadai

Indikator

- 1). Persentase Asset OPD dalam kondisi baik
- 2). Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi
- 3). Persentase realisasi anggaran pengadaan asset

Terlaksananya Pengadaan Asset

Indikator

Jumlah Asset yang dibeli

Meningkatnya Pengelolaan Asset

Indikator

- 1). Jumlah penghapusan asset
- 2). Jumlah Asset yang di service
- 3). Jumlah Asset yang dikelola

Terimplementasinya SOP OPD

Indikator

- 1). Persentase SOP yang dilaksanakan
- 2). Persentase kebijakan pelayanan yang disosialisasikan

Tersedianya SOP OPD

Indikator

Jumlah SOP yang disusun

Terlaksananya evaluasi SOP secara berkala

Indikator

Jumlah SOP yang direvisi

Tersedianya Sarana pengaduan masyarakat

Indikator

- 1). Jumlah media pengaduan
- 2). Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum perkantoran

Indikator

- 1). Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
- 2). Persentase dokumen yang diasip sesuai aturan

Terlaksananya Pengelolaan Arsip

Indikator

- 1). Jumlah arsip statis yang dikelola
- 2). Jumlah arsip dinamis yang dikelola

Terlaksananya Pengelolaan Surat menyurat

Indikator

- 1). Jumlah Surat masuk yang dikelola
- 2). Jumlah surat keluar yang dikelola
- 3). Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pengelolaan urusan Rumah tangga kantor

Indikator

- 1). Jumlah tagihan surat kabar
- 2). Jumlah tagihan listrik, air, internet
- 3). Jumlah peralatan rumah tangga OPD yang dibeli

Terlaksananya pengadaan barang pakai habis

Indikator

- 1). Jumlah barang pakai habis yang dibeli
- 2). Jumlah barang pakai habis yang dikelola